

# Rencana Aksi OGI Pada Inpres 2012

## S1 : PENCEGAHAN

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
<b>S1P1 Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi</b>				
S1P1A1: Pelaksanaan pelayanan perizinan secara online dan keterbukaan informasi status perizinan	Kepolisian RI	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik dalam penanganan perkara pidana sesuai dengan Revisi Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	<b>TARGET:</b> Terbangunnya sistem penanganan perkara berbasis TI dari Bareskrim POLRI sampai dengan Ditreskrim POLDA, Polres dan Polsek yang dapat diakses oleh masyarakat, dengan target 25% dari jumlah POLRES dan POLSEK yang ada pada saat ini.
S1P1A1: Pelaksanaan pelayanan perizinan secara online dan keterbukaan informasi status perizinan	Kepolisian RI	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik dalam penanganan perkara pidana sesuai dengan Revisi Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	<b>TARGET:</b> Tersosialisasikannya sistem penanganan perkara berbasis TI kepada Polsek, Polres, Polda percontohan
S1P1A1: Pelaksanaan pelayanan perizinan secara online dan keterbukaan informasi status perizinan	Kepolisian RI	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik dalam penanganan perkara pidana sesuai dengan Revisi Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	<b>TARGET:</b> Persentase penanganan perkara yang terdokumentasikan dalam sistem penanganan perkara yang berbasis TI
S1P1A2: Pelaksanaan transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di lingkungan Kepolisian	Kepolisian RI	N/A	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi kepolisian	<b>TARGET:</b> Terpublikasikannya informasi publik melalui website POLRI dan papan pengumuman di seluruh Indonesia, antara lain terdiri dari: a. Profil Organisasi dan SDM, struktur organisasi dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan kontak pejabat yang dapat dihubungi; b. penegakan hukum, pelayanan publik dan penjagaan ketertiban, dan informasi wajib lainnya sesuai dengan ketentuan KIP
S1P1A3: Pelaksanaan pelayanan paspor yang cepat, mudah, transparan dan tepat waktu dan bebas dari pungutan liar	Kementerian Hukum dan HAM	N/A	Pelayanan pembuatan paspor menjadi mudah, murah, cepat, transparan dan tepat waktu dari mulai proses awal sampai terbit paspor sehingga dapat meminimalisir terjadinya pungutan liar	<b>TARGET:</b> 100% kantor imigrasi yang sudah dapat melayani pemberian paspor dalam waktu 4 (empat) hari setelah pengambilan foto pemohonanbebasdaripungutan liar
S1P1A4: Pelaksanaan administrasi hukum perdata dan administrasi badan hukum yang transparan dan akuntabel	Kementerian Hukum dan HAM	N/A	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	<b>TARGET:</b> Terpublikasikannya Berita Negara (BN), tambahan Berita Negara (TBN) dan layanan permohonan badan hukum diumumkan secara tepat waktu melalui situs yang dapat diakses oleh masyarakat
S1P1A5: Penguatan pertukaran data perpajakan dan dokumen ekspor dan impor antara DJP dan DJBC	Kementerian Keuangan	N/A	Penggunaan data ekspor impor yang sama (unified data) dalam perhitungan bea cukai dan pajak oleh DJP dan DJBC sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan DJP dan DJBC	<b>TARGET:</b> Terbangun dan termanfaatkannya sistem pertukaran data dokumen ekspor, impor dan perpajakan antara DJP dan DJBC dalam perhitungan bea cukai dan perpajakan.
S1P1A6: Pelaksanaan whistle blower system pada Instansi pemerintah dalam proses pengadaan Barang dan Jasa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Kementerian Dalam Negeri	1. Peningkatan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada whistle blower dalam rangka pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa 2. Mendorong pengungkapan penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa	<b>TARGET:</b> 1. Jumlah K/L dan Pemda (Prov/Kab/Kota) yang memiliki whistle blower system dalam proses pengadaan barang dan jasa 2. Tersedianya whistle blower system yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Lembaga dan Pemda pada portal pengadaan nasional
S1P1A6: Pelaksanaan whistle blower system pada Instansi pemerintah dalam proses pengadaan Barang dan Jasa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	N/A	Peningkatan efektivitas sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada whistle blower dalam rangka pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa	<b>TARGET:</b> Evaluasi terhadap whistle blower system di K/L dan Pemda dalam proses pengadaan barang dan jasa
S1P1A7: Pelaksanaan whistleblowing system di lingkungan DJBC yang terintegrasi dengan sistem di Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan	N/A	1. Peningkatan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada whistle blower dalam rangka pemberantasan korupsi di lingkungan DJBC 2. Mendorong pengungkapan penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan di lingkungan DJBC	<b>TARGET:</b> Tertanganinya seluruh pengaduan whistle blower yang telah diverifikasi sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penerimaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada DJBC
S1P1A8: Pelaksanaan pelayanan perizinan secara online dan keterbukaan informasi status perizinan	Kementerian Lingkungan Hidup	N/A	Peningkatan kemudahan Masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam pengurusan perizinan dengan minimal <i>human interaction</i>	<b>TARGET:</b> Tersedianya sistem pelayanan perizinan secara online yang dapat diakses oleh masyarakat
S1P1A8: Pelaksanaan pelayanan perizinan secara online dan keterbukaan informasi status perizinan	Kementerian Perdagangan	N/A	Peningkatan kemudahan Masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam pengurusan perizinan dengan minimal <i>human interaction</i>	<b>TARGET:</b> Tersedianya sistem pelayanan perizinan secara online yang dapat diakses oleh masyarakat
S1P1A8: Pelaksanaan pelayanan perizinan secara online dan keterbukaan informasi status perizinan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	N/A	Peningkatan kemudahan Masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam pengurusan perizinan dengan minimal <i>human interaction</i>	<b>TARGET:</b> Tersedianya sistem pelayanan perizinan secara online yang dapat diakses oleh masyarakat
S1P1A8: Pelaksanaan pelayanan perizinan secara online dan keterbukaan informasi status perizinan	Kementerian Lingkungan Hidup	N/A	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas terhadap informasi dan status perizinan sesuai tahapan yang ditentukan, termasuk antara lain : 1. Jenis layanan dan mekanisme 2. Besar biaya dan lama waktu 3. Status proses aplikasi	<b>TARGET:</b> Tersedianya publikasi informasi secara online mengenai pengurusan perizinan tertentu, status permohonan perizinan serta izin yang telah diterbitkan (berserta dokumen pendukungnya)
S1P1A8: Pelaksanaan pelayanan perizinan secara online dan keterbukaan informasi status perizinan	Kementerian Kehutanan	N/A	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas terhadap informasi dan status perizinan sesuai tahapan yang ditentukan, termasuk antara lain : 1. Jenis layanan dan mekanisme 2. Besar biaya dan lama waktu 3. Status proses aplikasi	<b>TARGET:</b> Tersedianya publikasi informasi secara online mengenai pengurusan perizinan tertentu, status permohonan perizinan serta izin yang telah diterbitkan (berserta dokumen pendukungnya)
S1P1A8: Pelaksanaan pelayanan perizinan secara online dan keterbukaan informasi status perizinan	Kementerian Perdagangan	N/A	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas terhadap informasi dan status perizinan sesuai tahapan yang ditentukan, termasuk antara lain : 1. Jenis layanan dan mekanisme 2. Besar biaya dan lama waktu 3. Status proses aplikasi	<b>TARGET:</b> Tersedianya publikasi informasi secara online mengenai pengurusan perizinan tertentu, status permohonan perizinan serta izin yang telah diterbitkan (berserta dokumen pendukungnya)
S1P1A8: Pelaksanaan pelayanan perizinan secara online dan keterbukaan informasi status perizinan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	N/A	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas terhadap informasi dan status perizinan sesuai tahapan yang ditentukan, termasuk antara lain : 1. Jenis layanan dan mekanisme 2. Besar biaya dan lama waktu 3. Status proses aplikasi	<b>TARGET:</b> Tersedianya publikasi informasi secara online mengenai pengurusan perizinan tertentu, status permohonan perizinan serta izin yang telah diterbitkan (berserta dokumen pendukungnya)
S1P1A9: Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Badan Koordinasi Penanaman Modal	N/A	Peningkatan kemudahan masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam pengurusan perizinan investasi dengan minimal <i>human interaction</i>	<b>TARGET:</b> Termanfaatkannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi berbasis TI di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
S1P1A10: Pelaksanaan transparansi layanan perizinan usaha di daerah	Kementerian Dalam Negeri	N/A	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas terhadap informasi dan layanan di PTSP yang meliputi: 1. Jenis layanan dan mekanisme 2. Besar biaya dan lama waktu 3. Status proses aplikasi	<b>TARGET:</b> Jumlah Provinsi, Kabupaten dan kota yang telah memiliki PTSP mempublikasikan informasi perizinan
S1P1A11: Pelaksanaan transparansi Proses Pengadaan Badan Publik Pemerintah	LKPP	Seluruh K/L, Pemerintah Daerah	Dalam APBN/APBD tahun 2012, sekurang-kurangnya 75 % dari seluruh belanja K/L dan 40 % belanja Pemda (Prov/Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSEnya sendiri atau LPSE terdekat	<b>TARGET:</b> Semua K/L dan Pemda (Prov/Kab/Kota) melaksanakan pengadaan barang/jasanya menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dengan mendirikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di K/L atau Pemda-nya masing-masing, atau bergabung dengan LPSE terdekat. Sehingga, terbentuk satu LPSE Nasional

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
S1P1A12: Pelaksanaan transparansi dan partisipasi dalam proses rekrutmen PNS	KemenPAN dan RB	Seluruh K/L, Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen PNS	<b>TARGET:</b> Jumlah K/L dan Pemda yang mempublikasikan proses rekrutmen PNS pada website-nya yang terintegrasi dengan website KemenPAN dan RB
S1P1A12: Pelaksanaan transparansi dan partisipasi dalam proses rekrutmen PNS	KemenPAN dan RB	Seluruh K/L, Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen PNS	<b>TARGET:</b> Terbangunnya mekanisme pengaduan masyarakat dalam proses rekrutmen PNS
S1P1A12: Pelaksanaan transparansi dan partisipasi dalam proses rekrutmen PNS	KemenPAN dan RB	Seluruh K/L, Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen PNS	<b>TARGET:</b> Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil rekrutmen PNS
S1P1A13: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas transportasi kereta api	Kementerian Perhubungan	BPK, Kementerian BUMN	Pengelolaan transportasi kereta api yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu layanan publik	<b>TARGET:</b> Terpublikasinya Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 Bidang Perkeretaapian dan standar pelayanan publik (SPM angkutan orang dengan KA) melalui website di lingkungan Kementerian Perhubungan
S1P1A13: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas transportasi kereta api	Kementerian BUMN	N/A	Pengelolaan transportasi kereta api yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu layanan publik	<b>TARGET:</b> Terpublikasinya pemanfaatan PSO dan laporan triwulan melalui website
S1P1A13: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas transportasi kereta api	Kementerian Perhubungan	BPK	Pengelolaan transportasi kereta api yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu layanan publik	<b>TARGET:</b> Terpublikasinya hasil audit BPK secara berkala melalui website
S1P1A14: Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran negara	Kementerian Keuangan	N/A	Pengelolaan anggaran negara yang transparan dan akuntabel	<b>TARGET:</b> Terpublikasikannya RAPBN, RKA-KL, APBN, DIPA, realisasi APBN seluruh K/L (triwulan, semester dan tahunan), Laporan audit APBN, data indikator dan alokasi anggaran DAU, DAK, DBH melalui website nasional Kemenkeu
S1P1A14: Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran negara	Kementerian Keuangan	N/A	Pengelolaan anggaran negara yang transparan dan akuntabel	<b>TARGET:</b> Transparansi pendapatan negara dari pajak yang diuraikan secara per sektor
S1P1A14: Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran negara	Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah Daerah terkait	Pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel.	<b>TARGET:</b> Terpublikasinya RAPBD, RKA-SKPD, APBD, DIPA Daerah, realisasi APBD seluruh SKPD, Laporan Audit APBD melalui website masing-masing Pemerintah Daerah.
S1P1A14: Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran negara	Kementerian Keuangan	Sekretariat DPR (Badan Anggaran DPR)	Penggunaan anggaran dana optimalisasi APBN yang ditransfer ke daerah sesuai dengan kriteria/formula	<b>TARGET:</b> Terpenuhinya kriteria/formula dalam pengalokasian dana ad-hoc ke daerah (apabila terdapat dana optimalisasi APBN)
S1P1A15: Pelaksanaan transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di lembaga peradilan	Sekretariat MA	N/A	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan	<b>TARGET:</b> Tersedianya informasi yang wajib dipublikasikan melalui website lembaga peradilan, antara lain terdiri dari: a. Profil Organisasi dan SDM, struktur organisasi dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan
S1P1A16: Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di lembaga peradilan	Sekretariat MA	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan kualitas pelayanan publik terkait penegakan hukum di lembaga peradilan	<b>TARGET:</b> Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat yang telah diklarifikasi
S1P1A16: Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di lembaga peradilan	Sekretariat MA	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan kualitas pelayanan publik terkait penegakan hukum di lembaga peradilan	<b>TARGET:</b> Terpublikasinya penanganan terhadap pengaduan masyarakat di lembaga peradilan melalui website MA
S1P1A17: Pelaksanaan Kepala Kepolisian No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI	Kepolisian RI	Komisi Kepolisian Nasional	Peningkatan upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum dan pengawasan terhadap kinerja Kepolisian dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.	Terbitnya Peraturan Kapolri tentang penegakan kode etik profesi POLRI yang memuat tentang kelembagaan dan tata cara penegakan kode etik profesi POLRI
S1P1A17: Pelaksanaan Kepala Kepolisian No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI	Kepolisian RI	Komisi Kepolisian Nasional	Peningkatan penyelesaian jumlah laporan dan informasi baik dari anggota POLRI maupun masyarakat tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum anggota POLRI sebagai bentuk	Terselesaikannya jumlah laporan dan informasi tentang pelanggaran kode etik (tindak pidana korupsi) yang ditangani oleh Divisi Propam dan Kompolnas
S1P1A18: Pelaksanaan whistle blower system di lingkungan Propam, Mabes Polri, Polda, dan Polres	Kepolisian RI	N/A	Peningkatan perlindungan bagi whistle blower di lingkungan Propam, Mabes Polri, Polda dan Polres	<b>TARGET:</b> Tersusunnya mekanisme (SOP) perlindungan terhadap Whistle blower bagi aparat Kepolisian
S1P1A18: Pelaksanaan whistle blower system di lingkungan Propam, Mabes Polri, Polda, dan Polres	Kepolisian RI	N/A	Mendorong pengungkapan penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat Propam, Mabes Polri, Polda dan Polres	<b>TARGET:</b> Tertanganinya pengaduan aparat petugas (Whistleblower) mengenai pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum di lingkungan Propam, Mabes Polri, Polda dan Polres
S1P1A19: Penyediaan data base dakwaan penanganan perkara	Kejaksaan Agung	N/A	1. Penguatan kapasitas Jaksa secara umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.	<b>TARGET:</b> Tersusunnya database penyusunan dakwaan perkara penting dalam penanganan perkara yang dapat diakses secara internal Kejaksaan (intranet Kejaksaan)
S1P1A20: Pelaksanaan transparansi informasi dan layanan publik di lingkungan Kantor Kejaksaan	Kejaksaan Agung	N/A	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan	<b>TARGET:</b> Terpublikasinya informasi publik di Kejaksaan melalui website, meja informasi dan papan pengumuman di kator Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang antara lain meliputi data-data:
S1P1A21: Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan	Kejaksaan Agung	Sekjen Ombudsman RI	1. Peningkatan kualitas layanan publik terkait tugas dan fungsi kejaksaan 2. Berkurangnya potensi penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan aparat kejaksaan	<b>TARGET:</b> Tersedianya mapping proses dan penyelesaian/tindak lanjut pengaduan masyarakat
S1P1A21: Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan	Kejaksaan Agung	Sekjen Ombudsman RI	1. Peningkatan kualitas layanan publik terkait tugas dan fungsi kejaksaan	<b>TARGET:</b> Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat yang telah di verifikasi
S1P1A21: Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan	Kejaksaan Agung	Sekjen Ombudsman RI	1. Peningkatan kualitas layanan publik terkait tugas dan fungsi kejaksaan 2. Berkurangnya potensi penyimpangan/	<b>TARGET:</b> Tersedianya linked database pengelolaan pengaduan antara Jamwas dan Komisi Kejaksaan
S1P1A22: Pelaksanaan pengelolaan database WBP di LAPAS/RUTAN sebagai bahan pengambilan kebijakan institusi	Kementerian Hukum dan HAM	N/A	Penangan administrasi tahanan dan WBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penyediaan informasi terkini yang akurat	<b>TARGET:</b> Tersedianya database informasi yang mengenai penghuni LAPAS/RUTAN secara bertahap melalui website Ditjen PAS yang terintegrasi dengan website UPT PAS, Kanwil Kemenkumham dan Kemenkumham
S1P1A23: Pelaksanaan transparansi data dan layanan Publik di lingkungan Pemasyarakatan (LAPAS/RUTAN)	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan kualitas pengelolaan informasi yang dapat diakses publik Tahanan, WBP, keluarganya sehingga masyarakat dengan mudah memperoleh informasi mengenai hak-	<b>TARGET:</b> Terbentuknya Unit layanan informasi di UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia
S1P1A23: Pelaksanaan transparansi data dan layanan Publik di lingkungan Pemasyarakatan (LAPAS/RUTAN)	Kementerian Hukum dan HAM	N/A	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan pemasyarakatan	<b>TARGET:</b> Terpublikasikannya Informasi antara lain terdiri dari: a. Informasi mekanisme (SOP) mengenai proses cuti, proses pembebasan bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), catatan perilaku penghuni LAPAS/tahanan, admisi dan orientasi layanan kunjungan, perawatan kesehatan di luar LAPAS/RUTAN, pemberian Remisi,
S1P1A23: Pelaksanaan transparansi data dan layanan Publik di lingkungan Pemasyarakatan (LAPAS/RUTAN)	Kementerian Hukum dan HAM	N/A	Peningkatan kualitas penilaian berkelakuan baik WBP yang berbasisan teknologi informasi sehingga dapat mengurangi praktek pungli	<b>TARGET:</b> Tersusunnya kajian tentang penilaian berkelakuan baik WBP berbasis teknologi
S1P1A24: Penguatan pengawasan internal di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan dalam upaya mengawasi dan evaluasi perilaku dan	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI	Berkurangnya pelanggaran/penyimpangan perilaku aparat Pemasyarakatan.	<b>TARGET:</b> Tersedianya mekanisme (SOP) pengawasan internal di lingkungan Pemasyarakatan termasuk pelaksanaan evaluasi perilaku dan kinerja serta penyimpangan oknum petugas LAPAS/RUTAN
S1P1A24: Penguatan pengawasan internal di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan dalam upaya mengawasi dan evaluasi perilaku dan	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI	Berkurangnya pelanggaran/penyimpangan perilaku aparat Pemasyarakatan.	<b>TARGET:</b> Terlaksananya monitoring dan evaluasi mekanisme pengawasan internal melalui website Ditjen PAS
S1P1A24: Penguatan pengawasan internal di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan dalam upaya mengawasi dan evaluasi perilaku dan	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI	Berkurangnya pelanggaran/penyimpangan perilaku aparat Pemasyarakatan.	<b>TARGET:</b> Terpublikasikannya hasil pengawasan internal di website Ditjen PAS
S1P1A25: Penguatan pengawasan eksternal melalui kerjasama dengan Ombudsman RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak,	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI, Satgas PMH, Komnas HAM, Komnas	Berkurangnya pelanggaran/penyimpangan perilaku aparat Pemasyarakatan	<b>TARGET:</b> Tersedianya mekanisme (SOP) pengawasan eksternal di lingkungan Pemasyarakatan termasuk pelaksanaan evaluasi perilaku dan kinerja serta penyimpangan oknum petugas LAPAS/RUTAN
S1P1A25: Penguatan pengawasan eksternal melalui kerjasama dengan Ombudsman RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak,	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI, Satgas PMH, Komnas HAM, Komnas	Berkurangnya pelanggaran/penyimpangan perilaku aparat Pemasyarakatan	<b>TARGET:</b> Terlaksananya monitoring dan evaluasi mekanisme pengawasan eksternal di website Ditjen PAS
S1P1A25: Penguatan pengawasan eksternal melalui kerjasama dengan Ombudsman RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak,	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI, Satgas PMH, Komnas HAM, Komnas	Berkurangnya pelanggaran/penyimpangan perilaku aparat Pemasyarakatan	<b>TARGET:</b> Terpublikasikannya hasil pengawasan eksternal di website Ditjen PAS
S1P1A25: Penguatan pengawasan eksternal melalui kerjasama dengan Ombudsman RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Satgas PMH, Hakim Wasmatdalam	Kementerian Hukum dan HAM	N/A	Berkurangnya penyimpangan yang dilakukan aparat dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan pelayanan Publik.	<b>TARGET:</b> Terlaksananya SIDAK secara acak (sesuai kebutuhan)
S1P1A25: Penguatan pengawasan eksternal melalui kerjasama dengan Ombudsman RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Satgas PMH, Hakim Wasmatdalam	Sekjen Ombudsman RI	N/A	Berkurangnya penyimpangan yang dilakukan aparat dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan pelayanan Publik.	<b>TARGET:</b> Terlaksananya SIDAK secara acak (sesuai kebutuhan)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
S1P1A26: Pelaksanaan whistle blower system di lingkungan LAPAS/RUTAN	Kementerian Hukum dan HAM	N/A	Mendorong upaya perbaikan dan emningkatkan peran dan fungsi pengawasan terhadap kinerja aparat Pemasyarakatan	<b>TARGET:</b> Tersedianya mekanisme perlindungan terhadap Whistleblower bagi petugas di lingkungan aparat pemasyarakatan
S1P1A26: Pelaksanaan whistle blower system di lingkungan LAPAS/RUTAN	Kementerian Hukum dan HAM	N/A	Peningkatan perlindungan bagi whistle blower di lingkungan LAPAS/RUTAN	<b>TARGET:</b> Penanganan yang responsif atas pengaduan aparat Pemasyarakatan (whistleblower) mengenai pelanggaran disiplin atau pelanggaran disiplin atau atau pelanggaran hukum di lingkungan Pemasyarakatan
S1P1A26: Pelaksanaan whistle blower system di lingkungan LAPAS/RUTAN	Kementerian Hukum dan HAM	N/A	Tersedianya Infrastruktur whistleblower secara bertahap di LAPAS dan RUTAN	<b>TARGET:</b> Infrastruktur Whistleblower (misal telepon khusus, kotak keluhan/surat, complaint center, pengaduan online) yang dapat langsung ditujukan kepada pengawas Pemasyarakatan
S1P1A27: Pelaksanaan pengawasan terhadap evaluasi kinerja tahunan pelayanan Pejabat Rutan	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI, Sekjen KPK	Peningkatan kualitas layanan LAPAS/RUTAN bagi WBP	<b>TARGET:</b> Tersedia instrumen survei kinerja untuk mengukur kinerja fungsi pelayanan WBP yang disusun dengan melibatkan berbagai pihak terkait (a.l. KPK, Ombudsman RI dan pakar)
S1P1A27: Pelaksanaan pengawasan terhadap evaluasi kinerja tahunan pelayanan Pejabat Rutan dan Lapas	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI, Sekjen KPK	Peningkatan integritas dan kualitas Kepala jabatan UPT Pemasyarakatan melalui tata cara pengangkatan yang transparan dan akuntabel	<b>TARGET:</b> Penyusunan Permenkumham tentang syarat dan tata cara pengangkatan jabatan kepala UPT Pemasyarakatan tertentu yang memuat: - Syarat administratif dan substantif berupa pengajuan lamaran, pemaparan visi misi dan program dan kesediaan untuk menandatangani kontrak kinerja
S1P1A28: Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap tugas dan fungsi LAPAS/RUTAN	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan kualitas layanan LAPAS/ RUTAN.	<b>TARGET:</b> Tersedianya sarana pengaduan masyarakat dan proses pengelolaan pengaduan masyarakat secara responsive terhadap kinerja LAPAS/RUTAN.
S1P1A28: Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap tugas dan fungsi LAPAS/RUTAN	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan kualitas layanan LAPAS/ RUTAN.	<b>TARGET:</b> Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat yang telah diverifikasi
S1P1A29: Pelaksanaan transparansi Layanan Publik di lingkungan Keimigrasian	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Imigrasi	<b>TARGET:</b> Penguatan sistem informasi keimigrasian (SIMKIM) dalam rangka keterbukaan informasi keimigrasian yang antara lain memuat: a. Profil Organisasi dan SDM, struktur organisasi dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan kontak pejabat yang dapat dihubungi;
S1P1A30: Penguatan pengawasan internal dilingkungan Ditjen Imigrasi	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI	Berkurangnya pelanggaran/penyimpangan perilaku aparat Imigrasi	<b>TARGET:</b> Tersedianya mekanisme (SOP) pengawasan internal di lingkungan Keimigrasian termasuk pelaksanaan evaluasi perilaku dan kinerja serta penyimpangan oknum petugas Keimigrasian
S1P1A30: Penguatan pengawasan internal dilingkungan Ditjen Imigrasi	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI	Berkurangnya pelanggaran/penyimpangan perilaku aparat Imigrasi	<b>TARGET:</b> Terpublikasikannya hasil pengawasan internal di website Ditjen Imigrasi
S1P1A30: Penguatan pengawasan internal dilingkungan Ditjen Imigrasi	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI	1. Peningkatan perlindungan bagi whistle blower di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 2. Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan yang	<b>TARGET:</b> Terlaksananya monitoring dan evaluasi mekanisme pengawasan internal di website Ditjen Imigrasi
S1P1A31: Penguatan pengawasan eksternal di lingkungan Ditjen Imigrasi	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI, Satgas PMH	Penguatan pengawasan eksternal di lingkungan Ditjen Imigrasi	<b>TARGET:</b> Tersedianya mekanisme (SOP) pengawasan eksternal di lingkungan Keimigrasian termasuk pelaksanaan evaluasi perilaku dan kinerja serta penyimpangan oknum petugas Keimigrasian
S1P1A31: Penguatan pengawasan eksternal di lingkungan Ditjen Imigrasi	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI, Satgas PMH	Penguatan pengawasan eksternal di lingkungan Ditjen Imigrasi	<b>TARGET:</b> Terlaksananya monitoring dan evaluasi mekanisme pengawasan eksternal di website Ditjen Imigrasi
S1P1A31: Penguatan pengawasan eksternal di lingkungan Ditjen Imigrasi	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI, Satgas PMH	Penguatan pengawasan eksternal di lingkungan Ditjen Imigrasi	<b>TARGET:</b> Terpublikasikannya hasil pengawasan eksternal dalam website Ditjen Imigrasi
S1P1A32: Pelaksanaan sistem whistle blower di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	N/A	1. Peningkatan perlindungan bagi whistle blower di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 2. Mendorong pengungkapan penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat	<b>TARGET:</b> Tersedianya mekanisme (SOP) perlindungan bagi petugas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
S1P1A33: Penyelesaian atas pengaduan masyarakat terhadap tugas dan fungsi Keimigrasian	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan kualitas pelayanan publik dilingkungan keimigrasian	<b>TARGET:</b> Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat atas layanan keimigrasian
S1P1A33: Penyelesaian atas pengaduan masyarakat terhadap tugas dan fungsi Keimigrasian	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan kualitas pelayanan publik dilingkungan keimigrasian	<b>TARGET:</b> 100% pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
S1P1A34: Pelaksanaan transparansi Layanan Publik di lingkungan Ditjen AHU	Kementerian Hukum dan HAM	N/A	Peningkatan pelayanan kepada stakeholders terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen AHU	<b>TARGET:</b> Penguatan Sistem Administrasi Badan Hukum yang memberikan Keterbukaan Informasi administrasi badan hukum yang antara lain memuat: a. Profil Organisasi dan SDM, struktur organisasi dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan kontak pejabat yang dapat dihubungi;
S1P1A35: Penyusunan mekanisme pengawasan internal di lingkungan Ditjen AHU	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI	Berkurangnya pelanggaran/penyimpangan perilaku petugas pelayanan AHU.	<b>TARGET:</b> Tersedianya mekanisme (SOP) pengawasan internal di lingkungan Ditjen AHU termasuk pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan serta penyimpangan oknum petugas di lingkungan Ditjen AHU
S1P1A36: Pelaksanaan whistle blower di lingkungan Ditjen AHU	Kementerian Hukum dan HAM	N/A	- Peningkatan perlindungan bagi whistle blower di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM - Mendorong pengungkapan penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat	<b>TARGET:</b> Tersedianya mekanisme (SOP) perlindungan terhadap Whistleblower bagi petugas pelayanan
S1P1A37: Pelaksanaan pengaduan masyarakat di lingkungan Ditjen AHU	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan petugas pelayanan dan pengawasan terhadap kinerja Ditjen AHU dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.	<b>TARGET:</b> Tersedianya sarana pengaduan masyarakat terhadap tugas dan fungsi Ditjen AHU
S1P1A37: Pelaksanaan pengaduan masyarakat di lingkungan Ditjen AHU	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan petugas pelayanan dan pengawasan terhadap kinerja Ditjen AHU dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.	<b>TARGET:</b> Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat yang telah diverifikasi.
S1P1A37: Pelaksanaan pengaduan masyarakat di lingkungan Ditjen AHU	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan petugas pelayanan dan pengawasan terhadap kinerja Ditjen AHU dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.	<b>TARGET:</b> Terpublikasikannya pelaksanaan pengaduan masyarakat melalui website AHU
S1P1A38: Pelaksanaan transparansi Layanan Publik di lingkungan BPN	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPN dan penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta bebas	<b>TARGET:</b> Terpublikasinya Informasi pelayanan publik pertanahan dilingkungan BPN yang antara lain memuat: a. Profil Organisasi dan SDM, struktur organisasi dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan kontak pejabat yang dapat dihubungi;
S1P1A38: Pelaksanaan transparansi Layanan Publik di lingkungan BPN	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPN dan penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta bebas	<b>TARGET:</b> Informasi bidang tanah di wilayah percontohan melalui website BPN (di 5 Kantor BPN percontohan)
S1P1A39: Pelayanan peralihan hak dan pembebanan hak sesuai ketentuan yang berlaku	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan kualitas pelayanan Publik di bidang pertanahan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel yang bebas dari korupsi	<b>TARGET:</b> Jumlah Kantor Pertanahan di berbagai provinsi yang melaksanakan pelayanan tunggal kegiatan peralihan hak jual beli, inbreng, merger dan kegiatan pembebanan sesuai ketentuan yang berlaku. (125 Kantor Pertanahan termasuk 50 Kantor Pertanahan yang lama)
S1P1A39: Pelayanan peralihan hak dan pembebanan hak sesuai ketentuan yang berlaku	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan kualitas pelayanan Publik di bidang pertanahan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel yang bebas dari korupsi	<b>TARGET:</b> Terselaksainnya 85% jumlah total permohonan pelayanan peralihan dan pembebanan hak yang masuk sesuai waktu penyelesaiannya dan biaya yang ditetapkan.
S1P1A40: Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Kantor Pertanahan dan	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan petugas pelayanan dan	<b>TARGET:</b> Tersedianya sarana pengaduan masyarakat dan proses pengelolaan pengaduan masyarakat secara responsif melalui portal BPN di 50 Kantor Pertanahan (pilot project)
S1P1A41: Penerapan Pelayanan pertanahan berbasis sistem loket	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan petugas kanator Pengawasan kinerja Kantor Pertanahan dan BPN dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.	<b>TARGET:</b> Terlaksananya pelayanan pertanahan kepada masyarakat di 75 kantor Pertanahan dengan sistem loket termasuk Kantor Pertanahan yang terindikasi terjadi banyak penyimpangan berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2010 tentang Loker Layanan
S1P1A42: Pelaksanaan whistle blower system di lingkungan kantor Pertanahan dan BPN	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	N/A	1. Peningkatan perlindungan bagi whistle blower di lingkungan Kantor Pertanahan dan BPN	<b>TARGET:</b> Tersusunnya mekanisme (SOP) perlindungan bagi aparat/petugas di Kantor Pertanahan dan BPN.
S1P1A42: Pelaksanaan whistle blower system di lingkungan kantor Pertanahan dan BPN	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	N/A	1. Peningkatan perlindungan bagi whistle blower di lingkungan Kantor Pertanahan dan BPN 2. Mendorong pengungkapan penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat	<b>TARGET:</b> Tertanganinya seluruh pengaduan aparat/ petugas di kantor Pertanahan dan BPN (whistle blower) terkait pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum
S1P1A43: Penguatan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan NIK dan e-KTP	Kementerian Dalam Negeri	N/A	Meminimalisir terjadinya penyimpangan atas penerbitan NIK dan e-KTP yang berpotensi korupsi	<b>TARGET:</b> Terlaksananya pengawasan atas penerbitan NIK di 497 Kab/Kota dan e-KTP di 300 Kab/Kota (100,51 juta jiwa)
S1P1A44: Pengawasan terhadap optimalisasi	Kementerian Dalam	N/A	Peningkatan pemanfaatan data kependudukan	<b>TARGET:</b> Tersedianya database kependudukan nasional

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
pelaksanaan koneksitas data kependudukan dari penyelenggara ke instansi pengguna	Negeri		berbasis NIK nasional oleh K/L	berbasis NIK yang dapat di akses oleh K/L terkait
S1P1A44: Pelaksanaan terhadap optimalisasi pelaksanaan koneksitas data kependudukan dari penyelenggara ke instansi pengguna	Kementerian Dalam Negeri	N/A	Peningkatan pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK nasional oleh K/L	<b>TARGET:</b> Jumlah K/L yang dapat mengakses dan memanfaatkan database kependudukan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik terkait (Pilot project dengan 5 K/L)
S1P1A45: Pelaksanaan transparansi pengelolaan anggaran Daerah	Kementerian Dalam Negeri	N/A	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah	<b>TARGET:</b> Jumlah Provinsi, Kab/Kota yang mempublikasikan data mutakhir APBD, RAPBD, RKA SKPD, APBD, DPA SKPD, LKPD, laporan realisasi anggaran melalui website nasional
S1P1A46: Pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Kementerian BUMN	N/A	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	<b>TARGET:</b> Publikasi informasi penerimaan dan belanja negara terkait pengelolaan sumber daya alam di bidang minyak, gas, dan pertambangan secara rutin dalam website
S1P1A46: Pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah Daerah	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	<b>TARGET:</b> Publikasi pelaporan pendapatan daerah dari industri ekstraktif (minyak, gas, dan tambang) secara rutin dalam website Pemerintah Daerah
S1P1A46: Pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Kementerian BUMN	Kementerian Keuangan, Bank Indonesia	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	<b>TARGET:</b> Persentase data cost recovery yang di publikasikan dalam website
S1P1A46: Pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Kementerian ESDM	N/A	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	<b>TARGET:</b> Publikasi rehabilitasi pasca tambang di publikasikan dalam website
S1P1A46: Pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	N/A	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan industry ekstraktif (minyak, gas dan tambang)	<b>TARGET:</b> Publikasi laporan penerimaan negara dari industry ekstraktif (minyak, gas dan tambang) melalui website
S1P1A47: Pelaksanaan transparansi Layanan Publik di lingkungan Bea dan Cukai	Kementerian Keuangan	N/A	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan Bea dan Cukai	<b>TARGET:</b> Terlaksananya pelayanan cukai yang cepat, akurat, efektif dan efisien melalui sistem pelayanan cukai on-line berbasis web yang terintegrasi secara nasional
S1P1A48: Pelaksanaan kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan PPAATK dalam rangka pertukaran data	Kementerian Keuangan	N/A	Peningkatan kualitas Governance Dirjen Pajak di bidang pemeriksaan berbasis analisis risiko dengan data yang andal	<b>TARGET:</b> Terlaksananya pertukaran data berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak) dengan PPAATK
S1P1A49: Pelaksanaan whistleblower system di lingkungan Dirjen Pajak	Kementerian Keuangan	N/A	Peningkatan perlindungan bagi whistle blower di lingkungan Dirjen Pajak	<b>TARGET:</b> Terselaseikannya 60% kasus pengaduan yang masuk, secara transparan dan konsisten
S1P1A49: Pelaksanaan whistleblower system di lingkungan Dirjen Pajak	Kementerian Keuangan	N/A	Mendorong pengungkapan penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat Dirjen Pajak	<b>TARGET:</b> Terselaseikannya infrastruktur dan sistem informasi pendukung pelaksanaan whistleblower system di DJP berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No PER-22/PJ.11/2011
S1P1A50: Penerapan Pakta Integritas secara konsisten pada K/L, Pemerintah Daerah dan pengawasannya oleh komponen masyarakat	Kementerian PAN dan RB	BPK, BPKP, Sekjen KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia	Peningkatan Integritas K/L dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.	<b>TARGET:</b> Terlaksananya penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh K/L serta Pemda Prov/Kab/Kota (Bebas Korupsi) dengan BPK, BPKP, KPK (untuk K/L), Kejaksaan dan POLRI (untuk Pemda Prov/Kab/ Kota) serta CSO setempat yang bergerak di Bidang Anti Korupsi
S1P1A50: Penerapan Pakta Integritas secara konsisten pada K/L, Pemerintah Daerah dan pengawasannya oleh komponen masyarakat	Kementerian PAN dan RB	BPK, BPKP, Sekjen KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia	Peningkatan Integritas K/L dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.	<b>TARGET:</b> Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas integritas K/L maupun Pemda terkait
S1P1A51: Pembangunan sistem Pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi (TI)	Sekjen Ombudsman RI	N/A	1. Peningkatan kegiatan pengawasan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi 2. Peningkatan penyelesaian laporan pengaduan	<b>TARGET:</b> Tersedianya sistem pengendalian dan pengawasan pelayanan publik berbasis TI
S1P1A51: Pembangunan sistem Pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi (TI)	Sekjen Ombudsman RI	N/A	1. Peningkatan kegiatan pengawasan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi 2. Peningkatan penyelesaian laporan pengaduan	<b>TARGET:</b> Terselaseikannya laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik
S1P1A52: Penguatan Pengawasan atas penyaluran serta penggunaan dana BOS yang dikelola Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	N/A	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana BOS	<b>TARGET:</b> Tersedia dan terlaksananya revisi sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOS secara on line
S1P1A53: Penguatan pengawasan atas penyaluran serta penggunaan dana BOS yang dikelola Kementerian Agama	Kementerian Agama	N/A	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana BOS	<b>TARGET:</b> Tersedia dan terlaksananya revisi sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOS secara on line
S1P1A54: Pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal yang bebas korupsi	Kementerian Kesehatan	N/A	Sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal yang transparan dan akuntabel secara online	<b>TARGET:</b> Tersedianya dan terlaksananya sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal secara on-line
S1P1A55: Pengawasan atas pelaksanaan proses registrasi alat kesehatan secara on - line	Kementerian Kesehatan	N/A	Sistem pengawasan atas pelaksanaan proses registrasi alat kesehatan secara yang transparan dan akuntabel secara on line	<b>TARGET:</b> Tersedianya dan terlaksananya sistem pengawasan atas pelaksanaan proses registrasi alat kesehatan secara on line
S1P1A56: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pertambangan dan migas	Kementerian ESDM	Kemenko Perekonomian, Kementerian keuangan, Pemerintah Daerah	Tersedianya sistem informasi pengelolaan di bidang pertambangan mineral dan batubara secara transparan	<b>TARGET:</b> Terlaksananya proses penentuan kebijakan di bidang pertambangan melalui pemanfaatan TI
S1P1A56: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pertambangan dan migas	Kementerian ESDM	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah	Terselaseikannya inventarisasi izin pertambangan yang diberikan oleh Pemda	<b>TARGET:</b> Peninjauan pemberian izin pertambangan oleh Pemda
S1P1A56: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pertambangan dan migas	Kementerian ESDM	Pemerintah Daerah	Termonitoringnya kegiatan operasional pertambangan yang dapat dipertanggung jawabkan	<b>TARGET:</b> Peningkatan monitoring operasional pertambangan
S1P1A56: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pertambangan dan migas	Kementerian ESDM	Kementerian Dalam Negeri, Bakosurtanal, Pemerintah Daerah	Penetapan perkiraan lifting migas per daerah penghasil dapat lebih cepat, tepat dan akurat	<b>TARGET:</b> Laporan penyusunan penetapan daerah penghasil dan alokasi dasar penghitungan lifting migas serta realisasi lifting migas setiap triwulan
S1P1A56: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pertambangan dan migas	Kementerian ESDM	Kementerian Dalam Negeri, BP MIGAS	1. Diperolehnya data volume produksi dan lifting secara online dan kontinyu 2. Membangun akses informasi volume produksi dan lifting migas bagi seluruh stakeholder secara cepat dan transparan 3. Tersedianya bahan evaluasi bagi pimpinan dalam	<b>TARGET:</b> Laporan implementasi, pemeliharaan dan pengembangan sistim monitoring lifting migas
S1P1A56: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pertambangan dan migas	Kementerian ESDM	LKPP	Meningkatkan pelayanan, transparansi dan akuntabilitas di bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Migas – KESDM	<b>TARGET:</b> Laporan penyiapan dan implementasi e-proc Ditjen Migas – KESDM
S1P1A56: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pertambangan dan migas	Kementerian ESDM	N/A	1. Terbentuknya sistem pelayanan yang bersih, transparan dan efisien 2. Memberikan layanan investasi terpadu secara online di Ditjen Migas 3. Perbaikan organisasi data, sistim informasi dan proses kerja pelayanan 4. investasi Ditjen Migas	<b>TARGET:</b> Laporan pengelolaan dan pengembangan data dan sistim informasi teknologi serta jaringan
S1P1A56: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pertambangan dan migas	Kementerian Lingkungan Hidup	N/A	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam kegiatan operasional pertambangan	<b>TARGET:</b> Termonitoringnya efek lingkungan hidup dalam kegiatan operasional pertambangan.



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
<b>S1P1A57:</b> Memperkuat koordinasi dan supervisi bidang pencegahan baik di K/L maupun di daerah	Sekjen KPK	N/A	Optimalisasi fungsi koordinasi dan supervisi bidang Pencegahan	<b>TARGET:</b> Penguatan pelaksanaan koordinasi dan supervisi KPK bidang Pencegahan dengan sasaran sistem PBJ, sistem penganggaran dan pelayanan publik di semua propinsi dan kabupten/kota di seluruh Indonesia.melalui : 1. Supervisi, pembenahan sistem layanan publik di Pemprov/Pemkot dan Pemkab 2. Koordinasi dengan Pemprov, Pemkot dan Pemkab pada sistem PBJ dan sistem penganggaran/keuangan
<b>S1P2 Implementasi UU Pelayanan Publik</b>				
<b>S1P2A58:</b> Penerapan Undang-undang pelayanan Publik	KemenPAN&RB	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan standar yang sama di K/L dan Daerah	<b>TARGET:</b> Terbitnya PermenPAN dan RB tentang Juknis Standar Pelayanan Publik  <b>TARGET:</b> Terdiseminaskannya UU Pelayanan Publik dan peraturan pelaksanaannya ke seluruh K/L dan Pemda
<b>S1P2A59:</b> Pemantauan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di daerah	Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah Daerah, Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah sesuai SPM	<b>TARGET:</b> Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan publik di daerah berdasarkan indikator utama (fasilitasi untuk penyusunan 15 SPM)
<b>S1P2A60:</b> Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik	KemenPAN&RB	Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik	<b>TARGET :</b> Tersedianya instrumen pemantauan dan evaluasi/penilaian penyelenggaraan pelayanan publik  <b>TARGET :</b> Terpublikasikannya hasil evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada penyelenggara terpilih yang sangat strategis
<b>S1P2A61:</b> Penyempurnaan mekanisme perizinan di bidang lingkungan hidup	Kementerian Lingkungan Hidup	N/A	Peningkatan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam pengurusan perizinan di bidang lingkungan hidup tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar	<b>TARGET :</b> Terbitnya RPP baru /revisi dan peraturan dibawahnya tentang perizinan dibidang lingkungan hidup yang berazas cepat, non diskriminatif, transparan, akuntabel dan harga yang terjangkau
<b>S1P2A62:</b> Penyempurnaan sistem pengendalian intern yang menekankan pada soft control	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Seluruh K/L , Pemerintah Daerah	1. Peningkatan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pengamanan asset yang tinggi. 2. Peningkatan kehandalan laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah 3. Berkurangnya perilaku korupsi dalam organisasi pemerintah	<b>TARGET :</b> Terbitnya 60 laporan hasil perbaikan sistem pengendalian intern yang berbasis risiko
<b>S1P2A63:</b> Penyusunan peraturan sistem pengendalian intern di Kementerian/Lembaga dan Pemda	BPKP	Seluruh K/L, Pemerintah Daerah, Sekjen Ombudsman RI	1. Peningkatan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pengamanan asset yang tinggi. 2. Peningkatan kehandalan laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah 3. Berkurangnya perilaku korupsi dalam organisasi pemerintah	<b>TARGET :</b> Terbitnya 90 Peraturan Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota
<b>S1P3 Pembenahan Sistem Melalui Reformasi Birokrasi</b>				
<b>S1P3A64:</b> Penyusunan peraturan pelaksanaan UU No. 17/2003 mengenai anggaran berbasis kinerja	Kementerian Keuangan	Kementerian Hukum dan HAM	Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan negara yang transparan dan akuntabel	<b>TARGET :</b> Tersusunnya Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-KL
<b>S1P3A65:</b> Penyusunan peraturan mengenai sistem rekrutmen pegawai di seluruh K/L secara on-line	KemenPAN&RB	Seluruh K/L	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen pegawai di seluruh K/L	<b>TARGET :</b> Terbitnya peraturan tentang sistem rekrutmen pegawai di seluruh K/L secara on-line
<b>S1P3A66:</b> Perubahan PP Disiplin PNS (PP 53/2010) yang mengatur penjatuhan sanksi bagi PNS yang memiliki kekayaan tidak wajar	KemenPAN&RB	Kementerian Hukum dan HAM, Setneg, Kementerian Dalam Negeri, BKN, Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan akuntabilitas PNS serta pengawasan dari pihak internal dan eksternal terkait dengan perolehan harta kekayaannya	<b>TARGET:</b> • Terbitnya revisi PP 53 tahun 2010 (pasal 6) tentang Disiplin PNS. Oleh karena proses pembuktian terbalik merupakan proses yustisia maka revisi PP tersebut antara lain mengatur : - Apabila seorang PNS yang sedang dalam proses penyelidikan, atau penyidikan, atau dalam proses peradilan yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan pemeriksaan oleh atasan yang berwenang terhadap
<b>S1P3A67:</b> Pengawasan seleksi dan promosi di lembaga penegak hukum	KemenPAN&RB	Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dan promosi aparat penegak hukum	<b>TARGET:</b> Tersedianya mekanisme pengawasan seleksi dan promosi bagi aparat penegak hukum  <b>TARGET:</b> Tersedianya laporan mengenai pengawasan seleksi dan promosi bagi aparat penegak hukum  <b>TARGET :</b> Tersedianya hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan seleksi dan promosi bagi aparat penegak hukum
<b>S1P3A68:</b> Penyusunan peraturan pelaksanaan rotasi dan promosi PNS secara terbuka, akuntabel dan berbasis kompetensi	KemenPAN&RB	Kementerian Hukum dan HAM, Setneg, Kementerian Dalam Negeri, BKN	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen kepegawaian termasuk rotasi dan promosi PNS	<b>TARGET:</b> Terbitnya Peraturan Pemerintah mengenai keterbukaan informasi dalam pelaksanaan rotasi dan promosi PNS  <b>TARGET:</b> Terpublikasikannya hasil evaluasi terhadap pelaksanaan sistem rotasi dan promosi PNS
<b>S1P3A69:</b> Penggantian dalam jabatan dan rotasi berbasis kompetensi	KemenPAN&RB	Kementerian Hukum dan HAM, Setneg, Kementerian Dalam Negeri, BKN, BPKP, LAN, dan pengawasan Internal Instansi	Peningkatan kinerja PNS	<b>TARGET:</b> Terbitnya Peraturan Menteri PAN dan RB tentang standarisasi kompetensi jabatan
<b>S1P3A70:</b> Penyusunan pengaturan mengenai anti benturan kepentingan ( <i>conflict of interest</i> )	KemenPAN&RB	BKN, LAN	Berkurangnya praktek penyalahgunaan kewenangan pejabat dalam proses penyusunan kebijakan	<b>TARGET:</b> Terbitnya Peraturan Menteri PAN dan RB mengenai Konflik Kepentingan bagi pejabat di lingkungan birokrasi

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
<b>S1P3A71:</b> Penguatan lembaga peradilan berdasarkan <i>competency based</i>	Sekretaris MA	N/A	Peningkatan jumlah Hakim yang memiliki kompetensi dan integritas yang dibutuhkan dalam penegakan hukum	<b>TARGET:</b> Terlaksananya seleksi calon hakim berdasarkan kompetensi
				<b>TARGET:</b> Terlaksananya diklat dan sertifikasi berdasarkan hasil seleksi kompetensi hakim
<b>S1P3A72:</b> Pengawasan dan pelaksanaan kewajiban terkait LHKPN (UU RI Nomor 28 Tahun 1999) oleh pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis yang ditentukan di K/L	KemenPAN&RB	Sekjen KPK, Seluruh K/L	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kekayaan pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis yang baru menduduki jabatan, menempati jabatan baru atau selesai menjabat	<b>TARGET:</b> Persentase LHKPN yang terkini dari pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis yang menempati jabatan baru atau selesai menjabat
<b>S1P3A72:</b> Pengawasan dan pelaksanaan kewajiban terkait LHKPN (UU RI Nomor 28 Tahun 1999) oleh pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis yang ditentukan di K/L	KemenPAN&RB	Sekjen KPK, Seluruh K/L	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kekayaan pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis yang baru menduduki jabatan, menempati jabatan baru atau selesai menjabat	<b>TARGET:</b> Pelaksanaan dan Pemantauan penjatuan sanksi administratif oleh K/L bagi pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis yang tidak melaporkan LHKPN terkini.
<b>S1P3A73:</b> Perbaikan sistem pengelolaan dan pengalokasian anggaran pada lembaga penegak hukum	Kepolisian Republik Indonesia	BPKP, BPK, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Kementerian Keuangan, Sekjen KPK	Pengelolaan dan pengalokasian anggaran lembaga penegak hukum yang sesuai dengan kebutuhan riil untuk mendukung efektifitas pelaksanaan kinerja lembaga penegak hukum	<b>TARGET:</b> Tersedianya hasil audit sistem pengelolaan anggaran yang dilakukan di lembaga penegak hukum yang antara lain memuat: • Praktek pengelolaan anggaran • Efisiensi dan ketepatan pengelolaan dan pengalokasian anggaran • Pertanggungjawaban penggunaan anggaran
<b>S1P3A73:</b> Perbaikan sistem pengelolaan dan pengalokasian anggaran pada lembaga penegak hukum	Kejaksaan Agung	BPKP, BPK, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Kementerian Keuangan, Sekjen KPK	Pengelolaan dan pengalokasian anggaran lembaga penegak hukum yang sesuai dengan kebutuhan riil untuk mendukung efektifitas pelaksanaan kinerja lembaga penegak hukum	<b>TARGET:</b> Tersedianya hasil audit sistem pengelolaan anggaran yang dilakukan di lembaga penegak hukum yang antara lain memuat: • Praktek pengelolaan anggaran • Efisiensi dan ketepatan pengelolaan dan pengalokasian anggaran • Pertanggungjawaban penggunaan anggaran
<b>S1P3A73:</b> Pelaksanaan sistem pengelolaan dan pengalokasian anggaran pada lembaga penegak hukum	Kementerian Hukum dan HAM	BPKP, BPK, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Kementerian Keuangan, Sekjen KPK	Pengelolaan dan pengalokasian anggaran lembaga penegak hukum yang sesuai dengan kebutuhan riil untuk mendukung efektifitas pelaksanaan kinerja lembaga penegak hukum	<b>TARGET:</b> Tersedianya hasil audit sistem pengelolaan anggaran yang dilakukan di lembaga penegak hukum yang antara lain memuat: • Praktek pengelolaan anggaran • Efisiensi dan ketepatan pengelolaan dan pengalokasian anggaran • Pertanggungjawaban penggunaan anggaran
<b>S1P3A74:</b> Pelaksanaan tindak lanjut hasil survei Kinerja Fungsi Penanganan Perkara	Kejaksaan Agung	Komisi Kejaksaan, Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan kualitas Kinerja kepolisian dan Kejaksaan Agung terkait fungsi penanganan perkara	<b>TARGET:</b> Laporan hasil survei kinerja fungsi penanganan perkara yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan Agung secara bersama dengan pengawas eksternal
				<b>TARGET:</b> Laporan tindak lanjut hasil survey kinerja fungsi penanganan perkara dan rekomendasi
<b>S1P3A74:</b> Pelaksanaan tindak lanjut hasil survei Kinerja Fungsi Penanganan Perkara	Kepolisian Republik Indonesia	Komisi Kepolisian Nasional, Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan kualitas Kinerja kepolisian dan Kejaksaan Agung terkait fungsi penanganan perkara	<b>TARGET:</b> Laporan hasil survei kinerja fungsi penanganan perkara yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan Agung secara bersama dengan pengawas eksternal
				<b>TARGET:</b> Laporan tindak lanjut hasil survey kinerja fungsi penanganan perkara dan rekomendasi
<b>S1P3A75:</b> Penempatan pejabat strategis lembaga penegak hukum	Kepolisian Republik Indonesia	Komisi Kepolisian Nasional, Sekjen KPK, PPATK, Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penempatan pejabat di pos-pos strategis yang dilakukan melalui proses assessment	<b>TARGET:</b> Terdokumentasinya hasil assessment pejabat-pejabat pada posisi strategis, yang bisa diakses secara terbatas, dengan parameter-parameter, termasuk antara lain: - verifikasi terhadap harta kekayaan LHKPN dan transaksi keuangan (dengan meminta input
<b>S1P3A75:</b> Penempatan pejabat strategis lembaga penegak hukum	Kejaksaan Agung	Komisi Kepolisian Nasional, Sekjen KPK, PPATK, Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penempatan pejabat di pos-pos strategis yang dilakukan melalui proses assessment	<b>TARGET:</b> Terdokumentasinya hasil assessment pejabat-pejabat pada posisi strategis, yang bisa diakses secara terbatas, dengan parameter-parameter, termasuk antara lain: - verifikasi terhadap harta kekayaan LHKPN dan transaksi keuangan (dengan meminta input
<b>S1P3A75:</b> Penempatan pejabat strategis lembaga penegak hukum	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen KPK, PPATK, Sekjen Ombudsman RI	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penempatan pejabat di pos-pos strategis yang dilakukan melalui proses assessment	<b>TARGET:</b> Terdokumentasinya hasil assessment pejabat-pejabat pada posisi strategis, yang bisa diakses secara terbatas, dengan parameter-parameter, termasuk antara lain: - verifikasi terhadap harta kekayaan LHKPN dan transaksi keuangan (dengan meminta input dari KPK dan PPATK)
<b>S1P3A76:</b> Penerapan Rekrutmen Penyidik melalui Assesment (khusus)	Kepolisian RI	Kementerian PAN dan RB, Komisi Kepolisian Nasional	Peningkatan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus dan berintegritas berdasarkan proses yang adil dan akuntabel	<b>TARGET:</b> Jumlah penyidik yang direkrut melalui assessment (khusus)
<b>S1P3A77:</b> Pelaksanaan rekrutmen pegawai dan calon Jaksa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang independen	Kejaksaan Agung	Kementerian PAN dan RB, Komisi Kejaksaan	Laporan pelaksanaan rekrutmen pegawai dan calon Jaksa oleh pihak ketiga yang independen	<b>TARGET:</b> Hasil Kajian/Penelitian tentang standar kesejahteraan yang layak bagi penyidik dan pengambilan fungsi penyidikan
<b>S1P3A78:</b> Pemberdayaan pengawasan eksternal dalam kerangka EMI (pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawasan Internal) dan IME (pengawasan Internal Mendukung pengawasan Eksternal) dalam Kepolisian	Kepolisian RI	Komisi Kepolisian Nasional, BPK, Sekjen Ombudsman RI, BPKP, Sekjen KPK, Komnas HAM KPIA	Peningkatan akuntabilitas dan integritas kepolisian melalui pengawasan internal dan eksternal	<b>TARGET:</b> Tindak lanjut pengaduan / rekomendasi /klarifikasi/perbaikan dari Kompolnas, BPK, ORI, BPKP, KPK, Komnas HAM, KPIA, Komnas Perempuan, DPR, dan Organisasi Masyarakat Sipil oleh Kepolisian

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
Membenarkan pengambilan keputusan secara kolektif		Kementerian Hukum dan HAM Sekjen DPR, Komnas Perempuan		
<b>S1P3A79:</b> Pelaksanaan penegakan hukum terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan petugas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	Sekjen Ombudsman RI	- Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin dan kode etik serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. - Menurunnya jumlah pejabat dan petugas bermasalah yang dipromosikan dan dimutasikan.	<b>TARGET :</b> Laporan pelaksanaan kode etik dan pelanggaran disiplin
				<b>TARGET :</b> Terpublikasikannya kepada masyarakat atas pelaksanaan pengenaan sanksi hukum maupun administrasi kepada pejabat dan petugas yang telah melakukan pelanggaran.
<b>S1P3A80:</b> Penyusunan aturan administrasi petugas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	N/A	Petugas pengawasan internal yang berintegritas	<b>TARGET :</b> Tersedianya kualifikasi khusus terhadap petugas yang ditempatkan pada pengawasan internal
<b>S1P3A81:</b> Penguatan komitmen para pihak dalam pemberantasan penyelundupan	Kejaksaan Agung	Badan Koordinasi Keamanan Laut	Pemberian peran yang memadai bagi para pihak untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dalam pemberantasan penyelundupan	<b>TARGET :</b> Terlaksananya Memorandum of Understanding antara Kementerian Keuangan dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut
<b>S1P3A82:</b> Penguatan fungsi supervisi dan pengendalian atas PNBP	KemenPAN&RB	Kementerian Keuangan	Rekomendasi kelembagaan pelaksana supervisi/pembinaan PNBP di K/L	<b>TARGET :</b> Pelaksanaan kajian mengenai organisasi di K/L yang memiliki fungsi melakukan supervisi dan mengendalikan atas PNBP pada setiap KL
<b>S1P3A82:</b> Penguatan fungsi supervisi dan pengendalian atas PNBP	Kementerian Keuangan	KemenPAN&RB	Rekomendasi kebijakan supervisi dan pengendalian PNBP yang memadai oleh KL	<b>TARGET :</b> Pelaksanaan kajian mengenai kebijakan dalam pengelolaan PNBP di K/L